KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

L50MV275

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 NOMOR :					H.4 X Final H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
A.1 NPWP : 7 3 6 4 1 8 0 0 5 7 2 2 0 0 0									
A.2 NIK :									
A.3 Na	nma :	DR. YENNY							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG									
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		SAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7		
2 21-402-01		10.810.000		10.810.000	0	5	540.500		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota									
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 15									
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 1 1 1 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy									
в.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
ī	Nomor : Tanggal								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK									
		nsi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0						
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PRO				AM PROVINSI K	ALIMANTAN	TIMUR			
C.3	B ID Subunit Organisasi :]				
C.4	Tanggal : 1 1 dd 0 2 mm		mm 2	0 2 2 yyyy			_		
C.5	Nama Penandatangan : RUMAH SAKIT JIWA DAER			A DAERAH	ATMA HUSADA MAHAKA	AM PROVINSI KA	ALIMANTAN	TIMUR	
C.6	.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							benar dan telah saya	
			Sesuai dengan ketentu elektronik sehingga tid		aku, Direktorat Jenderal Pajak tanda tangan.	t mengatur bahwa d	okumen ini tela	ah ditandatangani secara	